

PERAN NEGARA DALAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DI MALAYSIA

Yuniarti¹

ABSTRACT

This research aims at explaining the role of state in industrialization process in Malaysia by giving the descriptions of state interventions during the industrial development through their various policies and institutions. By using descriptive qualitative method, this research is focused on the intensity and pattern of state intervention, and the implications to industrialization. The changes of economy system from traditional economy (extractive/ agricultural economy) into knowledge and high-technology based – manufacture and service industrial economy, and from labor-intensive industry to capital-intensive/labor-saved industry involved high government interference. The result of this research showed that the intervention is directed to create fair and equal inter-ethnic division of labour, and to protect local industries by imposing protective policies (ISI) and subsidies (EOI). Another trends emerged from this research are that achieving nation status is obtained by controlling the sciences and technology access, and that international market-oriented and liberalization are the keys of industrialization in Malaysia.

Key words: state – industrialization – Malaysia

Pendahuluan

Malaysia termasuk dalam kategori *East Asian Miracle* dalam laporan Bank Dunia 1993, dengan catatan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Pertumbuhan ekonomi dalam tiga dekade terakhir sejak 1970-2000. Seperti halnya di negara-negara kawasan lain, pertumbuhan ekonomi yang cepat di negara-negara di Malaysia menitikberatkan pada pembangunan industri. Malaysia memulai proses industrialisasi ini sekitar tahun 1970-an awal. Pada dekade pertama setelah memperoleh kemerdekaannya tahun 1957, ekonomi Malaysia menghadapi banyak masalah dengan kenyataan negara agraris dan secara etnis dan status sosial terfragmentasi. Sampai akhir tahun 1967, perekonomian didasarkan hampir seluruhnya pada produksi komoditi primer, terutama karet dan timah, dan tergantung sepenuhnya pada pasar Inggris. Akan tetapi dalam tiga dekade berikutnya, Malaysia berhasil bertransformasi menjadi ekonomi industri berorientasi ekspor yang berkembang cepat, dengan kebijakan ekonomi dan manajemen industri yang tepat sebagai jalan setapak menuju pembangunan yang cepat. (Seiichi Masuyama, et.al., 1997:185). Malaysia mampu mendudukkan dirinya sebagai salah satu negara industri baru (NICs/*new industrializing*

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Mulawarman Samarinda. Jl. Muara Muntai No.1 Kampus Gn. Kelua Samarinda 75119 Telp/Facs.0511-741312. Dimuat dalam: Jurnal Sosial Politika Vol.15 No.2 Desember 2008. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Mulawarman.

countries) di kawasan. Ledakan investasi di akhir tahun 1980-an mengubah perekonomian dan memicu pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP), dan pada tahun 2000-an akhir, Malaysia menjadi salah satu produsen dan eksportir besar peralatan elektronik, minyak dan gas alam cair, kayu dan produk kayu, minyak kelapa, karet, tekstil dan produk-produk kimia (CIA, *World Factbook*, 2007). Pertumbuhan GDP dari 5,7% (US\$ 25,5 milyar) tahun 1981-91, meningkat menjadi 6,1% (US\$ 49,1 milyar) tahun 1991-01, 8,2% (US\$ 89,7 milyar) tahun 2000 (World Bank, 2002), dan 5.7 % tahun 2007 (CIA, *World Factbook*, 2008).

Peran negara sangat penting dalam hal pemberian kesempatan dan bagian dalam perekonomian dalam masyarakat yang terfragmentasi secara etnis. Malaysia yang mengandalkan hasil bumi sebagai dasar perekonomiannya dan sangat protektif terhadap sektor pertaniannya, perlahan-lahan mengejar ketinggalannya dengan mulai menggeser paradigma ekonomi berorientasi kedalam menuju ekonomi berorientasi pasar luar negeri. Keseriusan pemerintah dalam pencapaian tujuan tersebut ditunjukkan dengan *masterplan*-nya untuk menjadi *full develop country 2020*.

Di Malaysia, industrialisasi di karakterkan juga oleh adanya investasi asing, terutama dalam bentuk investasi asing langsung (FDI/*foreign direct investment*). Diantara delapan *The High Performance of Asian Economies/HPAEs* (Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, Thailand, dan Indonesia). Pada awal pembangunan industri tahun 1970-an, Malaysia memiliki ketergantungan terbesar kedua setelah Singapura di kawasan Asia Timur. Rata-rata pertumbuhan arus FDI diantara HPAEs dalam periode 1971-1993 menunjukkan Singapura menempati urutan pertama dengan nilai 24,28%, diikuti Malaysia dengan 14,84%, Hong Kong 6,52%, Thailand 3,74%, Indonesia 2,9%, Taiwan 2,08%, dan Kore Selatan 0,88%. (UNCTAD, *World Investment Report* 1993).

Modal asing dalam bentuk investasi industri memainkan peran penting dalam ekonomi yang berorientasi ekspor, baik melalui *joint venture* (perusahaan gabungan) dengan perusahaan lokal maupun melalui pembangunan yang sepenuhnya dimiliki oleh asing. Keuntungan utama dari investasi asing bagi negara tuan rumah adalah penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi. Salah satu yang mendorong investasi asing adalah dengan membangun *export processing zones* (EPZs). Dalam suatu EPZs, negara tuan rumah harus menyediakan infrastruktur untuk industri dan seperangkat kebijakan, seperti pembebasan bajak, pajak ekspor yang rendah, atau pengurangan tarif ekspor-impor. Strategi EPZs sangat mungkin berhasil dalam perekonomian yang berorientasi ekspor dan mempunyai kelas pengusaha. Melalui pembangunan EPZs Malaysia berhasil meningkatkan produktivitasnya. (Ashok K.Dutt, 1996:79). Penang (*the silicon valley*), dan Kinabalu (Sabah) merupakan dua kawasan industri bebas berorientasi ekspor yang berhasil dikembangkan oleh pemerintah Malaysia.

Melihat pentingnya negara dalam pembangunan industri, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan-kebijakan yang diterapkan negara, dan pola serta intensitas intervensi negara dalam pembangunan industri di Malaysia dan apa pengaruhnya terhadap proses industrialisasi.

Kerangka Teori

Peran negara yang besar dalam pembangunan ekonomi bisa dipahami melalui pendekatan *Developmental State*. Dalam pendekatan ini peran negara yang kuat dimungkinkan untuk menciptakan hubungan baik dan mutual antara sektor publik dan sektor swasta. Intervensi negara dalam pasar menjadi suatu kebutuhan. Intervensi negara dalam pasar meliputi tiga komponen, yaitu: (1) kepemimpinan dan kontrol langsung produksi industri merupakan kepentingan kedua dibanding dengan proses pembangunan infrastruktur ekonomi melalui proses pendidikan, pelatihan dan penelitian; (2) negara menjalankan peran kunci dalam hubungan kerjasama buruh-manajemen; dan (3) yang terpenting, negara mengambil alih peran pemimpin dalam menciptakan keuntungan komparatif. (Chalmers Johnson, 1982: 9-10).

Inti permasalahan intervensi negara pada dasarnya bukan terletak pada perlu tidaknya intervensi negara dalam pasar, tetapi kualitas intervensi tersebut. Baik di negara maju maupun negara berkembang, intervensi negara selalu ada. Yang membedakan diantara keduanya intensitas dan kapasitas negara sebagai aktor dalam intervensi tersebut. Richard Luedde-Neurath membedakan intervensi negara dalam pasar kedalam dua kelompok, yaitu *promotional* dan *directive intervention*. *Promotional intervention* bertujuan memperbaiki pasar dalam arti mengembalikan fungsi-fungsi pasar yang sebenarnya, umumnya melalui insentif non-diskriminasi. Intervensi ini juga bertujuan untuk menyediakan *public goods*, yang tidak bisa disediakan oleh pasar efisien, seperti infrastruktur, pendidikan dan sebagainya. *Directive intervention* bertujuan untuk mencapai hasil yang sudah ditentukan melalui campur tangan dengan kekuatan pasar dan pelaksanaan selektif insentif dan/atau kontrol. Jika *promotional intervention* didasarkan atas premis bahwa kekuatan pasar yang tidak terdistorsi mengetahui dengan baik apa bentuk dan arah pembangunan industri yang harus diambil, maka *directive intervention* mengasumsikan bahwa pasar tidak perlu memiliki kualitas tersebut. Dalam *directive intervention*, umumnya, pemerintah atau negara melakukan intervensi dalam ekonomi domestik melalui kebijakan industri, kebijakan finansial dan kontrol harga. Sedangkan dalam ekonomi eksternal, negara mengontrol perdagangan, kurs, investasi asing, perbankan, dan transfer teknologi. (Richard Luedde-Nuerath, 1989:102-3).

Intervensi negara menjadi prasyarat yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan industri di Malaysia. Pengalaman industrialisasi di negaraini mengimplikasikan dorongan yang lebih pada *directive intervention* dibanding *promotional intervention*, karena negara memiliki intensitas intervensi yang cenderung tinggi dalam ekonomi baik domestik maupun eksternal, dan kesempurnaan pasar dan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi dicapai melalui fasilitas-fasilitas dan kegiatan-kegiatan yang diberikan dan dilakukan oleh negara.

Dalam pendekatan ekonomi neo-klasik, keberhasilan industrialisasi Malaysia merupakan refleksi dari keberhasilan kebijakan negara dalam memperluas kekuatan pasar eksternal. Kebijakan industri berorientasi ekspor

dianggapa sebagai faktor krusial dalam industrialisasi yang cepat, kekuatan disiplin bagi daya saing yang lebih besar, dan sektor manufaktur yang lebih efisien. (Anne O. Krueger, 1981). Dan yang penting adalah, bahwa dasar keberhasilan ekspor merupakan hasil dari eksploitasi keuntungan komparatif, yaitu konsentrasi pada produksi di bidang yang relatif berlimpah, baik tanah, buruh maupun modal. (Richard Robinson, et.al.,1997:6).

Intervensi negara penting pada tahap awal industrialisasi dimana kapasitas untuk mengaplikasikan modal dan buruh dalam jumlah yang besar adalah yang menentukan. Tetapi ketika inovasi dan teknologi menjadi faktor kritis dalam transisi dari intervensi negara menuju pelaksanaan pasar yang lebih bebas menjadi lebih penting. (Paul Krugman, 1984). Negara di negara-negara berkembang, harus berperan sebagai penyedia jalan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, yang dibutuhkan sektor swasta untuk beroperasi. Hal ini memastikan pasar dijaga untuk tetap bebas, mata uang asing dan modal finansial dijaga mendekati nilai kelangkaan, dan stabilitas moneter dijaga. Hal penting adalah bahwa semua aktivitas yang dapat dijalankan oleh industri swasta diserahkan pada industri swasta, dan pemerintah tidak berusaha untuk mendikte bagi berjalannya pasar. (Gordon White, ed., 1988:32).

Melihat pada kasus pembangunan ekonomi dan industrialisasi di Asia, intervensi negara tidak lagi menjadi titik kritis, tetapi lebih pada masalah apakah intervensi menghambat pembuatan keputusan dalam sektor swasta atau tidak. Dalam laporan Bank Dunia tahun 1991, pendekatan neo-klasik diperluas dengan pendekatan negara yang ramah pasar (*market friendly approach*). Pendekatan ini mengartikulasikan bahwa peran pemerintah ditujukan untuk memastikan investasi seimbang dalam masyarakat, memberi iklim kompetitif untuk perusahaan swasta, menjaga ekonomi terbuka untuk perdagangan internasional dan mempertahankan stabilitas ekonomi mikro. Diluar peran ini, pemerintah cenderung merusak dibanding memperbaiki, kecuali intervensi bersifat ramah pasar. Pendekatan ini menekankan aspek keberhasilan ekonomi Asia yang stabil secara makro, bagian dalam perdagangan internasional yang diukur dalam GDP, investasi besar dalam sumber daya manusia, dan memiliki daya saing yang kuat diantara perusahaan. Tetapi karakter-karakter ini dihasilkan dari berbagai instrumen kebijakan yang berbeda.(World Bank, 1991).

Sejalan dengan pendekatan neo-klasik dan *market friendly*, dalam proses industrialisasi di Malaysia memperlihatkan bahwa negara tidak sekedar menjadi *market facilitator* tetapi juga pelaku pasar yang menciptakan sistem pasar bebas. Peran negara sangat penting dalam menyatukan masyarakatnya yang terfragmentasi secara etnis dan kelas. Pembagian kerja yang diwariskan oleh pemerinah kolonial Inggris membagi masyarakat Malaysia kedalam tiga kelompok, yaitu China, India, dan Melayu dalam konteks sosial ekonomi. Kondisi ini sangat menyulitkan pemerintah Malaysia ketika memperoleh kemerdekaannya dan terutama setelah kegagalan program industrialisasi substitusi impor yang memuncak ketika terjadinya kerusuhan rasial 1969.

Pembahasan

Pembangunan Industri Di Malaysia

Ekonomi Malaysia merupakan perekonomian gabungan sektor swasta dan sektor publik yang diatur dengan baik. Pertumbuhan ekonomi negara ini mencapai 9% untuk periode 1988-94 dan mengalami penurunan menjadi 5% tahun 1998/99. Ekspor produk manufaktur meluas dengan cepat yang disertai dengan peningkatan arus masuk investasi asing. Kebijakan pemerintah Malaysia yang tepat mampu membawa negara ini pulih dari krisis dalam waktu yang relatif singkat. Lingkungan ekonomi makro yang stabil dengan tingkat inflasi dan pengangguran yang relatif rendah memungkinkan pelonggaran kontrol modal yang dijalankan pemerintah tahun 1998 untuk mencegah dampak krisis finansial Asia. (Photius Coutsoukis, 2000).

Pada awal kemerdekaannya 1957 perekonomian Malaysia disandarkan pada produksi barang mentah untuk ekspor, terutama minyak bumi, gas alam, karet, timah, minyak sawit, dan kayu. Transformasi ekonomi awal tahun 1970-an menjadi tonggak dimulai industrialisasi mengubah perekonomian ekstraktif ini menjadi perekonomian industri. Memasuki tahun 1980-an, sektor manufaktur memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi. Produksi dan konsumsi barang-barang elektronik merupakan hal yang penting dalam ekonomi. Pemerintah mengimplementasikan sejumlah rencana pembangunan dari jangka menengah hingga panjang, dimulai dengan NEP yang merupakan kebijakan ekonomi 20 tahun, dari tahun 1970-1990, dan *the First Outline Perspective Plan* (OPP 1), yang memperjuangkan kesejahteraan yang lebih besar untuk etnis Melayu. Diikuti kemudian dengan NDP (*National Development Plan*) kebijakan pembangunan nasional awal 1990-an dan *the Second Outline Perspective Plan* (OPP 2), yang menghapus banyak keistimewaan bagi etnis Melayu. Rencana ketiga yang tercantum dalam *the Third Outline Perspective Plan* (OPP 3), mempersiapkan strategi pembangunan Malaysia untuk tahun 2001-2010 dan merancang proyek pembangunan ekonomi yang besar untuk menjadikan Malaysia sebagai negara industri maju 2020.

The New Economic Policy 1970-1990 dan The First Outline Perspective Plan 1971-1990

1. *The New Economic Policy* (NEP) 1970-1990

NEP memiliki dua program, yaitu memusnahkan kemiskinan rakyat Malaysia dan merestrukturisasi masyarakat Malaysia sehingga identifikasi ras dengan fungsi ekonomi dan lokasi geografi perlahan dikurangi, dan kedua tujuan tersebut direalisasikan melalui ekspansi ekonomi yang cepat. Kebijakan ini diterjemahkan kedalam dua kebijakan, yaitu: bantuan terhadap etnis Melayu (Bumiputera) dan perencanaan pembangunan regional. Kebijakan pertama dalam bentuk peraturan dan institusi yang dirancang untuk membantu Bumiputera untuk masuk dalam sektor perkotaan, khususnya industri, perdagangan dan keuangan, termasuk kepemilikan dan manajemen perusahaannya. Di bawah NEP, konsep pembangunan regional pun berubah, bukan lagi sekedar masalah kontribusi untuk pertumbuhan pendapatan nasional disektor primer (pertanian) tapi lebih pada

mengurangi disparitas regional antar etnis dan meningkatkan pendapatan, kesehatan dan pendidikan etnis Melayu. (Niles Hansen, et.al.m 1990:207).

Target pencapaian 30% persamaan sebelum tahun 1990 ditetapkan bagi Bumiputera dalam sektor manufaktur yang menjadi motor penggerak pertumbuhan cepat. Sifat NEP membuat intervensi menjadi hal yang tidak terhindarkan. Peraturan menjadi sangat kuat di sektor pertanian dan jasa terutama di bidang perkebunan dan perbankan. Kelompok Bumiputera yang mengontrol beberapa perusahaan mulai beroperasi dibidang perkebunan dan melakukan penetrasi media. Modal asing berangsur-angsur digantikan oleh agen-agen Bumiputera di beberapa perkebunan. (Garry Rodan, et.al., 1997:126).

2. *The First Outline Persepective Plan- 1971-1990*

Pelaksanaan NEP 1970 dan OPP 1-1971 merupakan tahap awal periode modernisasi ekonomi Malaysia. NEP dan OPP 1 diimplementasikan untuk meningkatkan pertumbuhan dengan distribusi ekonomi yang adil dalam rangka merestrukturisasi masyarakat Malaysia dan memelihara kesatuan nasional. Hal yang penting adalah pelaksanaan *Industrial Co-ordination Act* (ICA) Tahun 1975 yang kontroversial yang ditujukan untuk memutuskan pembangunan dan pertumbuhan sektor manufaktur yang tertata. Tujuan inti ICA adalah mendorong partisipasi Bumiputera dalam pembangunan industri negara. ICA memuat persyaratan saham yang ketat dan permintaan-permintaan lainnya untuk memperoleh lisensi manufaktur. (Masuyama, et.al., 1997:186).

OPP 1 membentuk kerangka kerja sosial ekonomi pencapaian target-target yang diterapkan dalam NEP. Restrukturisasi menjadi prioritas dengan tujuan utama mengurangi kemiskinan masyarakat Malaysia secara keseluruhan. Tujuan kedua adalah restrukturisasi dalam lapangan pekerjaan, kepemilikan bagian dalam sektor korporasi dan pembentukan *Bumiputera Commersial and Industri Community* (BCIC) yang memerlukan perluasan partisipasi Bumiputra di sektor formal.

Tabel 1
Restrukturisasi Kemiskinan NEP 1970-1990

	1970	1990 Target	1990 Realisasi
Kemiskinan (Semenanjung Malaysia)	49 %	16,7%	15%
Sektor:			
• Pedesaan	58,7%	23%	21%
• Perkotaan	21,3%	9,1%	7,5%
Etnis:			
• Melayu	65%		20,8%
• China	26%		5,7%
• India	39%		8%
• Lain-lain	44,8%		18%

Sumber: Departemen Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Lingkungan Malaysia 1991, dalam Masuyama, et.al., 1997.

Tabel 2.

Restrukturisasi Lapangan Pekerjaan NEP 1970-1990

Sektor	1970	1990 Target	1990 Realisasi
Primer • Pertanian	66,2%	37,4%	29%
Sekunder • Pertambangan, manufaktur, konstruksi, peralatan, transportasi	12,1%	26,8%	30,5%
Tersier • Jasa	21,7%	35%	40%

Sumber: *Ibid.*

NEP juga menekankan pembentukan kelas Bisnis Bumiputera, sehingga keadilan partisipasi NEP bisa didukung oleh kontrol manajerial. Target kualitatif ini dinterprestasikan dalam beragam cara oleh banyak pihak yang berbeda pula. Beberapa kalangan melihat kebijakan ini lebih merupakan pembentukan kelompok jutawan Bumiputera, sementara yang lain melihatnya sebagai pembentukan kelas dinamis penguasa-penguasa Bumiputera yang efisien. Akan tetapi lambatnya perkembangan bisnis Bumiputera dan pendapatan tambahan pemerintah menyebabkan pemerintah mendirikan BCIC. *The Bumiputera Investment Foundation* (BIF) yang dibentuk 1978 membentuk Permodalan Nasional Berhad (PNB) ditahun yang sama, dengan tujuan memperluas jalur bisnis dengan kepemilikan yang sama diantara Bumiputera. (Garry Rodan, 1997:132).

Usaha restrukturisasi bertumpu pada pertumbuhan yang cepat di sektor manufaktur yang menjadi sumber utama lapangan pekerjaan baru. Intervensi negara berbentuk subsidi untuk perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor. Kegiatan ekspor meluas tahun 1972 yang didorong aktivitas promosi yang berkelanjutan dari *United Nation's Industrial Development Organization, Asian Development Bank, Asian Productivity Organization, World Bank*, dan perusahaan-perusahaan transnasional yang mencari biaya rendah di negara-negara berkembang dengan infrastruktur yang memadai, kontrol lingkungan yang longgar, buruh yang mudah dikontrol dan dilatih, dan pajak rendah. Perusahaan transnasional yang mencari buruh berlimpah dengan upah murah menjadikan Malaysia sebagai tempat produksinya.

1. *Look East Policy – 1980s*

Look East Policy yang di terapkan awal tahun 1980-an merupakan suatu program industrialisasi yang menitikberatkan pada industri berat dan elektronik. Kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh program industrialisasi yang untuk pertama kali diterapkan oleh Jepang, dan diikuti oleh Korea Selatan dan Taiwan. Pertumbuhan kota di Malaysia menjelang akhir 1980-an sangat berhubungan dengan kebutuhan Malaysia untuk memperluas industri-industri berat dan sumber-sumber berteknologi tinggi. Pertumbuhan infrastruktur sangat tergantung pada teknologi Jepang. Selama periode 1980-an, konstruksi beberapa proyek kunci di ambil alih oleh perusahaan-perusahaan konstruksi Jepang. Tahun 1982 Malaysia

menjadi negara dengan permintaan terbesar untuk ekspor konstruksi Jepang. (Goh Beng Lan, dalam Joel S. Kahn, 1988: 171).

Melalui kebijakan ini, pemerintah secara langsung melakukan intervensi dalam sektor manufaktur untuk memperluas partisipasi Bumiputera dalam bisnis. Pemerintah memulai proyek industri berat untuk menciptakan rencana lintas sektoral untuk memperluas dasar pertumbuhan industri, dan menciptakan rencana kerja untuk mengembangkan kelas bisnis Bumiputera. Pembentukan *Heavy Industry Corporation of Malaysia* (HICOM) tahun 1981 menumbuhkan investasi negara dalam industri mobil, semen, baja dan motor, yang diikuti dengan proyek-proyek komplementer seperti pembuatan jalan. Melalui HICOM pemerintah masuk ke dalam pasar untuk mengembangkan industri barang-barang modal Bumiputera. Intervensi pemerintah antara lain berupa subsidi, proteksi, pengendalian pesaing-pesaing dalam pasar domestik, dan mengontrol usaha dan kepemilikan langsung. Kedah Cement, Perak Hanjoong, Perwaja dan Proton merupakan perusahaan yang di bentuk pemerintah yang di desain menjadi industri yang menyerap dan melatih manajer, teknisi, dan professional Bumiputera lainnya, dan menjadi organisasi induk perusahaan-perusahaan Bumiputera yang terkait. HICOM sangat tergantung pada dana dari pinjaman pemerintah sehingga hutang luar negeri meningkat. (Garry Rodan, et. al.,1997:132). Penekanan pembentukan kelas bisnis Bumiputera di sektor manufaktur di tingkatkan, termasuk perusahaan gabungan dengan modal asing, mengakibatkan lambatnya pembaruan insentif untuk perusahaan transnasional yang berorientasi ekspor. Hal ini terjadi pada dua perusahaan transnasional Amerika Serikat, *Advance Micro Device dan Monolithic Memories Incorporated*, yang mengancam merelokasikan perusahaannya tahun 1980-an.

Kondisi semakin memburuk ketika dalam periode 1981-1987 perekonomian Malaysia mengalami resesi terburuk pasca perang sebagai dampak krisis ekonomi global. Kebijakan industrialisasi besar yang diberlakukan tahun 1982 tidak memperbaiki keadaan. Banyak industri berat yang mulai berkembang, terutama baja dan produksi mesin-mesin berat yang membutuhkan modal besar, menyebabkan peningkatan hutang luar negeri dalam jumlah besar. Sampai dengan 1985, kemajuan untuk industrialisasi berat dan proyek-proyek infrastruktur menyebabkan hutang luar negeri Malaysia melonjak menjadi RM 52 juta. Pada tingkat 18% per tahun, pelayanan untuk hutang hanya 2% dibawah tingkat krisis yang ditentukan oleh *the International Monetary Fund* (IMF). (Masuyama, et.al.,1987:186).

Meningkatnya hutang luar negeri dan birokrasi yang tidak efisien dalam institusi pemerintah yang secara langsung sektor swasta, membuat pemerintah melakukan privatisasi yang bertujuan mendorong elemen kepemilikan swasta yang kompetitif (Jomo, et.al., 1995: 8), dan usaha pemerintah untuk mengurangi ketidakefisienan perusahaan-perusahaan negara. Dari tahun 1983-93 ada 72 perusahaan negara yang diprivatisasikan. Privatisasi telah menghapuskan hutang beberapa perusahaan yang di privatisasikan dan memperluas ruang gerak perusahaan tersebut dengan reorganisasi dalam kekuasaan negara. Kebanyakan perusahaan yang diprivatisasikan masih dikontrol oleh negara, seperti saham Syarikat Telekom Malaysia yang 75 % masih dipegang pemerintah. Beberapa

kalangan melihat bahwa program ini menjadi jalur penting untuk *rent-seeking*. Kekuasaan negara yang otoriter dan data statistik yang sangat rahasia tentang perusahaan yang diprivatisasikan menyebabkan kesulitan untuk menilai pelaksanaan program ini. (Jomo, et.al., 1995).

2. *The First Industrial Master Plan – 1986- 1995* (a)

Look East Policy mencapai titik puncaknya dalam the *First Industrial Master Plan* - 1986-1995. IMP 1 ditujukan untuk menyediakan cetak biru percepatan pembangunan industri. Percepatan pembangunan ini dicapai melalui transformasi struktural ekonomi dari ketergantungan yang tinggi pada produksi dan ekspor komoditi primer menjadi ekonomi industri yang lebih canggih. Cetak biru ini menandai pertama kalinya usaha yang serius perumusan kebijakan industri yang eksplisit untuk memenuhi target pertumbuhan sektoral. Pelaksanaan industri elektronik yang luar biasa di Malaysia terjadi selama 1970-an dan 1980-an, kecuali selama resesi pertengahan 1980-an. Selain industri elektronik, IMP 1 juga melakukan peningkatan industri berat yang berhubungan dengan pengalaman industrialisasi di Jepang dan Korea seperti baja, semen, otomobil dan mesin-mesin berat yang dipromosikan.

IMP 1 memprogram industrialisasi dalam dua dimensi, yaitu industri berdasarkan sumber alam dan industri non-sumber alam. Industri yang mengolah hasil alam yang berskala besar antara lain adalah industri pengolahan minyak kelapa, kayu gelondong, karet dan industri gas alam. Industri-industri non-sumber alam lebih berhasil dalam menciptakan nilai tambah karena didorong oleh besarnya arus FDI yang masuk. Banyak industri terutama yang memproduksi barang-barang otomobil, elektronik, berkembang dari perakitan sederhana menjadi industri yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Industri lainnya yang juga meningkatkan nilai tambah secara berjenjang adalah mesin, produk logam, peralatan transportasi, plastik dan logam dasar.

Keberhasilan terbesar IMP 1 didukung oleh *the Promotion of Investment Act* 1986 (PIA). Sejak 1986, pertumbuhan investasi meningkat tajam terutama yang berbentuk FDI. Hanya dua tahun setelah peraturan investasi diimplementasikan, jumlah investasi yang disetujui meningkat dua kali lipat, dari RM 4,7 milyar tahun 1986 menjadi RM 9,0 milyar tahun 1988. Lebih dari setengahnya adalah FDI. Penurunan FDI hanya terjadi di tahun 1994. FDI menjadi lebih penting dibanding investasi domestik karena besarnya selama IMP 1 berkisar 51% - 70%, kecuali pada tahun 1992, dimana FDI menurun menjadi 41,6%. (Masuyama, et.al., 1997: 192-3).

Peningkatan dan penurunan FDI yang masuk ke Malaysia juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Peningkatan yang terjadi tahun 1987 dipengaruhi adanya apresiasi yen dan meningkatnya biaya produksi di Jepang dan Taiwan sehingga mengurangi daya saing industri-industri di kedua negara ini. Kondisi ini mendorong keduanya untuk memindahkan lokasi produksi kenegaraanegara tetangga yang memiliki biaya produksi yang lebih rendah, seperti Malaysia. Selain itu Taiwan, Hong Kong, Singapura dan Korea kehilangan *preferential access* di pasar Amerika Serikat dibawah kesepakatan *the Generalized System of Preferences* (GSPs). Akibatnya, negara-negara ini mencari pintu masuk

lain dengan berinvestasi di Malaysia yang masih memiliki status prefensial. Sedangkan penurunan yang terjadi tahun 1992 disebabkan resesi ekonomi Jepang dan pemindahan sementara investasi Taiwan dari Malaysia ke China, yang baru dipindahkan kembali ke Malaysia tahun 1994.

National Development Plans 1990s dan The Second Outline Perspective Plan 1991-2000

Pelaksanaan NDP sebagai pengganti NEP dan OPP 2 dengan pelaksanaan *the Sixth Malaysia Plan 1991-95* dan *the Seventh* berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan NDP, partisipasi Bumiputera disemua proyek. Kebijakan ini tidak lagi memihak pada kelompok Bumiputera yang memperoleh prioritas selama pelaksanaan NEP 20 tahun.

Pemerintah Malaysia mengadakan perubahan sikap dalam mesin-mesin birokrasinya dengan menciptakan konsep *the Malaysia Incorporation* dalam rangka menciptakan hubungan saling mendukung antar sektor swasta dan pemerintah. Melalui konsep ini, pemerintah menjadi rekan langsung dalam industrialisasi, pengembangan investasi dan perdagangan negara. Kebijakan terbuka pemerintah telah menjadi bukti dalam pembentukan *the Malaysian Business Council* (MBC). Melalui dewan ini pemerintah memperoleh umpan balik yang berharga dari sektor swasta, seperti masukan tentang kebijakan yang berhubungan dengan sektor swasta dalam hal investasi, pengembangan industri, bisnis dan peran sektor swasta dalam proses pembangunan nasional. (Masuyama, et.al., 1997: 188).

1. *The First Industrial Master Plan – 1986-1995* (b)

Perkembangan ekonomi Malaysia memasuki 1990-1995 mengalami peningkatan yang pesat. Pertumbuhan tahun 1995 didukung oleh percepatan belanja domestik dan pulihnya ekonomi global, terutama di negara-negara maju. Pertumbuhan yang kuat dalam kemampuan memenuhi permintaan dan kapasitas produksi yang luas, sektor manufaktur memberi kontribusi besar dalam GDP sepanjang 1990-95. Sementara kontribusi sektor primer (pertanian, kehutanan, dan perikanan) dalam GDP tahun 1990-1995 mengalami penurunan dari 18,7% menjadi 13,65%; sektor pertambangan mengalami penurunan dari 9,8% menjadi 7,4%; sektor manufaktur meningkat dari 26,9% menjadi 33,1%. (*Ministry of Finance, Malaysia Economic Report 1995/6*).

Memasuki paruh kedua pelaksanaan IMP 1, pada awal 1990-an, pemerintah Malaysia dihadapkan pada masalah kekurangan buruh. Keberhasilan IMP 1 menuntut penyediaan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri, tidak hanya mengurangi jumlah buruh yang bekerja di sektor pertanian, tetapi juga di sektor industri itu sendiri. Kekurangan buruh di sektor pertanian terjadi di wilayah Barat Malaysia yang merupakan wilayah pertanian. Kebutuhan akan buruh ini digantikan oleh buruh migran dari Indonesia. (Azizah, 1995). Untuk mengurangi kekurangan buruh ahli di koridor industri bagian Barat, pemerintah menjalankan beragam aturan, termasuk insentif dan hukuman untuk meningkatkan pelatihan melalui *the Double Deduction Training Incentive* (DDTI) dan *the Human Resource Development Act* (HDRA). Konsisten

dengan inisiatif pemerintah untuk melibatkan sektor swasta, dibentuk *the Human Resource Development Fund* (HRDF) yang diatur oleh *the Human Resource Development Council* (HDRC) yang didominasi sektor swasta. (Garry Rodan, 1997: 138).

Kekurangan tenaga kerja yang tajam dalam perluasan investasi baru membuat pemerintah memperbaiki kekuatan tawar menawar terhadap perusahaan asing. Langkah ditujukan untuk meningkatkan kemampuan industrialisasi ketika *the Action Plan for Industrial Technology Development* (APITD) dijalankan tahun 1990. Rencana ini menawarkan rekomendasi menyeluruh untuk mentransformasikan ekonomi ke tahap industri maju tahun 2020 perdagangan industri teknologi tinggi strategis, perusahaan-perusahaan pendukung dan sumber daya manusia yang memenuhi syarat menjadi masalah utama untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam rangka perluasan industri ini pemerintah melakukan intervensi langsung untuk mengembangkan perusahaan lokal dan pasar eksternalnya, seperti Proton dan Sapura, dengan mendirikan *the Malaysia Technology Development Corporation* (MTDC) dan *the Malaysia-Industry Government Group of High Technology* (MIGHT) tahun 1993. MDTC ditujukan untuk membantu komersialisasi dan peningkatan teknologi, dan MIGHT merupakan mekanisme penguji yang mengidentifikasi dan meningkatkan kegiatan-kegiatan inovatif. Taman berteknologi tinggi di bangun di Kulim, dan menjelang tahun 1995, beberapa perusahaan, termasuk Intel menempati lahan tersebut untuk melakukan kegiatan perancangan. *The Malaysian Institute of Microelectronics System* juga merencanakan untuk mendirikan pabrik baja lapis. (Garry Rodan, 1997:138).

2. *The Second Industrial Master Plan – 1996-2005*

IMP 2 merupakan manajemen kebijakan yang untuk meningkatkan industrialisasi yang berkelanjutan, suatu kebijakan pembangunan industri terintegrasi dengan visi luas, yang memperluas sektor jasa yang mendukung sektor manufaktur dan bisnis. IMP 2 didasarkan pada pengelompokan sektor industri, yang terdiri dari industri, penyedia, dan jasa pendukung bisnis. IMP 2 mengklasifikasi sektor industri menjadi 8 kelompok, yaitu: elektronik, transportasi, kimia, tekstil dan pakaian, peralatan berat, mesin dan perlengkapan, produk pertanian dan makanan, dan industri yang berdasarkan pada sumber alam. Diantara kelompok industri ini, sektor elektronik dan elektrik merupakan subsektor terbesar di Malaysia dalam hal lapangan kerja, hasil, nilai tambah dan ekspor.

IMP 2 diluncurkan pada saat kondisi ekonomi sehat dan kuat sehingga mampu mendorong kebijakan-kebijakan industri yang lebih selektif dibanding IMP 1, dalam rangka memandu Malaysia menjadi perekonomian industri maju sejalan dengan Visi 2020. Target program ini adalah mencapai industri yang berteknologi tinggi, padat modal, hemat tenaga kerja, teknologi informasi maju dan pendalaman struktur industri Malaysia menuju industri berskala besar dan menengah. IMP 2 mengadopsi strategi pengelompokan industri dengan integrasi vertikal dan horizontal untuk menjadi ujung tombak generasi baru industri dan *small and medium enterprises* (SMEs). (Masuyama, et.al., 1997:210). Proyek

teknologi informasi yang paling menonjol adalah *multimedia super corridor* (MSC) yang menjadi bagian subsektor industri dinamis.

3. *Malaysia's Multimedia Super Corridor dan Vision 2020*

MSC, yang diluncurkan 1 Agustus 1996, merupakan taman uji raksasa untuk pengujian tidak hanya teknologi multimedia tetapi juga yang, lebih penting, evolusi suatu cara hidup dalam era terbuka informasi dan pengetahuan (Mahathir Mohammad, 1998:7). Sejak diumumkan tahun 1995, MSC menjadi fokus dalam ambisi negara dalam program Visi 2020, yang didesain untuk mengubah Malaysia menjadi masyarakat maju dan informatif menjelang 2020. Dalam MSC, teknologi informasi menjadi pendorong utama sektor manufaktur dan jasa karena MSC menjadi pusat informasi masa depan Malaysia dan kawasan.

Secara fisik, MSC adalah wilayah seluas 15 x 50 km terletak di Selatan Kuala Lumpur. Wilayah ini membentang dari distrik bisnis Kuala Lumpur, termasuk *Kuala Lumpur City Center* (KLCC) dan menara tertinggi di dunia, Petronas, hingga *Kuala Lumpur International Airport* di selatan. Termasuk dalam wilayah ini adalah sejumlah tempat tinggal, kawasan perdagangan lama dan pengembangan industri, dan kompleks olah raga nasional. Sampai tahun 2000 banyak lahan menjadi perkebunan kelapa sawit, yang dikelola oleh *the Federal Land and Development Authority* (FELDA), Pemerintah Negara Bagian Selangor, pengusaha kecil dan swasta. Di pusat wilayah ini dibangun dua kota di bawah konstruksi Putrajaya (pusat administrasi Malaysia yang baru) dan Cyberjaya (pusat bagi sekelompok perusahaan dan pekerja yang terkait dalam kegiatan-kegiatan komersial dan teknologi yang baru).

Visi 2020 berujuan menciptakan Malaysia yang bersatu dan toleran secara ekonomi dan etika, yang ditopang dengan ekonomi yang maju, kompetitif dan dinamis. Strategi kunci visi ini adalah peningkatan dan pelaksanaan teknologi maju sebagai sarana akselerasi tingkat industrialisasi dan lompatan menuju status yang lebih kompetitif secara ekonomi. (Wendy Mee dalam Joel S. Kahn, 1988-233). Untuk mendukung visi ini pemerintah membentuk *National Information Technology Council* (NITC) dan *Multimedia Development Corporation* (MDC) serta memberi payung hukum melalui *Multimedia Convergence Act* (MCA). Sehubungan dengan kerangka hukum ini, Malaysia juga menjalin hubungan kerjasama dengan anggota ASEAN untuk memastikan proteksi hak milik intelektual dengan ditandatanganinya *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Co-operation 1995* oleh Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura dan Vietnam.

Krisis Finansial Asia 1997 dan Ekonomi Malaysia

Pertumbuhan mengesankan berubah dramatis ketika terjadi krisis finansial. Kekacauan pasar uang dan saham yang terjadi Juli 1997 dengan cepat menyebabkan kejatuhan ekonomi. Malaysia terseret dalam krisis dengan hutang luar negeri yang relatif kecil, dibanding Indonesia dan Thailand, dan tanpa melibatkan IMF. Akan tetapi tidak adanya kebijakan yang tegas dan jelas, keraguan sangat mempengaruhi proses pemulihan ekonomi Malaysia. Pertengahan

1998, ekonomi berada dalam resesi dan tidak ada tanda-tanda stabilitas harga-harga saham dan mata uang (Prema-Chandra A., 1999:28)

Ada beberapa pandangan yang melihat banyak krisis ringgit ini terjadi merupakan refleksi dari *Thai contagion* yang menimbulkan penarikan modal Thailand dari Malaysia secara besar-besaran. Meskipun demikian, penyebaran ini hanya merupakan faktor pemicu (*trigger factor*). Terseretnya Malaysia ke dalam krisis kawasan ini karena sejak awal, ekonomi negara ini sejak awal rawan terhadap serangan spekulasi ketika terjadi krisis. Kondisi ini diperburuk oleh kegagalan pemerintah Malaysia untuk menghancurkan sumber-sumber kerawanan secara tegas kepercayaan investor.

Krisis finansial membawa pengaruh negatif terhadap sektor industri Malaysia. Industri-industri yang berorientasi pasar domestik dan sektor konstruksi dan jasa dipengaruhi oleh penyusutan tuntutan domestik akibat penurunan harga saham dan jatuhnya pasarnya properti, dan penyusutan akhir depresiasi mata uang. Krisis mengakibatkan penurunan GDP dari 8,6% dari tahun 1996 menjadi 7,5% tahun 1997, penyusutan ekonomi 5% selama awal hingga pertengahan 1998, depresiasi ringgit mendekati 50% terhadap dolar pertengahan 1997 hingga awal 1998 (Prema-Chandra, 1999:29), inflasi 5,8% sejak Mei-Juli 1998 dan peningkatan pengangguran 6,7%. (Ministry of Finance, 1998).

Masalah krisis bertambah buruk karena Malaysia memiliki warisan kronisme sehingga pinjaman yang diberikan berdasarkan hubungan politik dibanding kebutuhan ekonomi, perusahaan-perusahaan dibebani hutang yang luar biasa, dan investasi Mahathir dalam pembangunan menara tertinggi di dunia, Petronas, bukanlah investasi produktif. (*The Economist*, 12 Agustus 1997:15). Kesulitan-kesulitan ekonomi Malaysia diperburuk oleh faktor-faktor diluar krisis seperti penurunan permintaan untuk dua ekspor utama (perlengkapan elektrik dan minyak bumi), dan kompetisi ketat dari negara-negara yang memiliki biaya produksi rendah di sektor tekstil. (ADB, *Asian Development Outlook*, 1998:93-4).

Pemerintah melalui bank sentral, BNM, merespon krisis dengan intervensi insentif di pasar valuta asing. Intervensi di pasar uang ditujukan untuk mempertahankan nilai ringgit dengan menjalankan kontrol mata uang ketat dan terbatas, dan kontrol atas modal pada Agustus 1997. Tetapi kebijakan ini tidak membawa hasil dan ringgit semakin melemah memasuki tahun 1998. Mahathir juga menyerang spekulator George Soros, sebagai penyebab krisis finansial Asia dalam pertemuan IMF dan Bank Dunia di Hong Kong. Melihat kondisi ini, pemerintah Malaysia kemudian membentuk beberapa institusi untuk mempercepat pemulihan sistem finansial yang melemah. Danaharta, perusahaan manajemen aset dibentuk untuk membeli dan mengatur pinjaman dan melakukan rekapitalisasi perbankan. *The Corporate Departement Restructuring Committee* (CDRC) dibentuk untuk mendorong pengaturan hutang kolektif antara debitur dan kreditur. Pemerintah juga meningkatkan konsolidasi finansial melalui merger untuk memperbaiki kepercayaan pasar dan meningkatkan pengembangan pasar modal. (*International Finance Center*, 2002).

Pola Intensitas Intervensi Negara dan Pengaruhnya Terhadap Industrialisasi:
Pergeseran *State-Led Industrialization* Menuju *Public - Private Partnership*

Intervensi negara di Malaysia cenderung pada tindakan *directive intervention* (intervensi langsung) dan sangat berdimensi politik. Tarik menarik kepentingan ekonomi dan politik sangat mempengaruhi tujuan intervensi yang dilakukan negara. Tujuan intervensi diarahkan antara lain pada penciptaan pembagian kerja antar etnis yang seimbang dan adil, melindungi perekonomian dan industri-industri dalam negeri dari pengaruh negatif ekonomi luar dan global, baik melalui kebijakan-kebijakan proteksi maupun subsidi. Peran pemerintah yang besar dalam proses industrialisasi mentransformasikan ekonomi tradisional menjadi ekonomi industri berteknologi tinggi. Industrialisasi berhasil mengubah ekonomi agraris dan ekstraktif Malaysia menjadi ekonomi industri baik yang berdasar sumber alam maupun non-sumber alam yang berbasis teknologi tinggi. Negara dan kekuasaannya yang mampu mendorong terciptanya pasar bebas, dan intervensi negara menjadi signifikan ada tahap awal industrialisasi dimana negara menjadi aktor yang memiliki kemampuan untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi seperti buruh dan modal di sektor-sektor yang sesuai. Ketika inovasi dan teknologi menjadi faktor utama dalam transformasi ekonomi maka, negara perlahan-lahan harus mengurangi perannya dengan tetap mengarahkan perekonomian kearah yang lebih terbuka hingga menuju liberalisasi.

Sejak awal pembangunan ekonomi, negara telah menjadi aktor utama dalam menggerakkan perekonomian nasional melalui industrialisasi untuk mencapai status sebagai negara maju. Dalam rangka ini pencapaian tujuan ini, pemerintah terus memperbaiki dan memperkuat landasan ekonomi untuk industrialisasi yang sedang berjalan dan daya saing negara sebagai pemain global dalam industri dan perdagangan global dengan penekanan pada pembangunan sumber daya manusia, teknologi dan penguatan infrastruktur fisik dan non-fisik.

Pada tahap awal industrialisasi, tujuan utama yang ditetapkan oleh pemerintah Malaysia adalah menciptakan keadilan sosial ekonomi antar etnis, sehingga kebijakan yang ditetapkan pemerintah bersifat diskriminatif dengan mengutamakan pembangunan ekonomi etnis Melayu. Ketidakpercayaan pada kapitalisme menyebabkan pemerintah melihat bahwa ketimpangan sosial ekonomi yang timbul dalam masyarakat setelah kerusuhan etnis ini dianggap pemerintah sebagai bentuk besarnya peran swasta (etnis China) dalam perekonomian, sehingga melalui NEP pemerintah selain berusaha meningkatkan peran serta dan kesempatan yang luas bagi etnis Melayu di setiap sektor ekonomi juga untuk membatasi aktivitas ekonomi etnis China, dan kebijakan ini merupakan bentuk intervensi negara dalam ekonomi yang besar. NEP juga sangat bermuatan politis, karena terkait dengan pencarian legitimasi bagi pemerintah setelah kegagalan program ISI yang berakibat terjadinya kerusuhan rasial. Oleh karena itu, industrialisasi berorientasi ekspor yang mulai dijalankan awal 1970-an ini menekankan kepemimpinan negara dalam perkembangannya hingga pertengahan 1980-an ketika program privatisasi mulai dijalankan.

Intervensi negara yang intensif berkurang cukup drastis ketika terjadi krisis ekonomi dunia pertengahan 1980-an yang mengharuskan pemerintah berbagi peran dengan sektor swasta dalam menjalankan dan mengembangkan perekonomian nasional. Program privatisasi mulai dijalankan dan pemerintah

melepas sebagian beberapa saham perusahaan-perusahaan negara ke tangan pihak swasta, dan banyak industri yang berorientasi ekspor yang dulunya dikuasai negara diserahkan pengelolaannya oleh pihak swasta. Sejak tahun 1986, pemerintah telah melakukan banyak restrukturisasi perusahaan-perusahaan negara dan deregulasi untuk mengurangi hambatan perdagangan, dan menumbuhkan investasi asing yang lebih besar. Meskipun NDP yang menggantikan NEP tidak lagi membenarkan adanya diskriminasi pada etnis tertentu dalam sektor ekonomi, manifestasi NEP masih kuat terlihat dalam perekonomian Malaysia kontemporer, dimana pucuk-pucuk pimpinan beberapa perusahaan publik dan sebagian swasta dipegang oleh etnis Melayu, atau orang-orang yang mempunyai hubungan erat dengan penguasa, antara lain seperti *the Fleet Group* dan *the Berjaya Group* yang dimiliki oleh Daim Zainuddin yang merupakan kroni Mahathir, UMBC Saga, *the Hong Leong Group* yang dimiliki pengusaha China dari Singapura yang sangat dekat dengan para pemimpin Barisan Nasional, dan *the Sapura Group* perusahaan yang dimiliki oleh Shamsuddin bin Abdul Kadir yang menguasai pertelekomunikasian di Malaysia. (Jomo, 1995:25-74). Kegiatan-kegiatan *rent-seeking* semacam inilah yang sulit sekali dihindari oleh pemerintah Malaysia dalam setiap pelaksanaan programnya. Ini pulalah yang menjadi salah satu sebab dominasi etnis non-Melayu, etnis China, dalam perekonomian sulit diminimalisir, meskipun pemerintah menjalankan kebijakan diskriminatif. Sifat pemerintahan Malaysia yang otoriter cenderung selalu membuka peluang masuknya pengaruh politik dalam keputusan ekonomi.

Menguatnya peran swasta sejak akhir tahun 1980-an tidak berarti berkurangnya peran pemerintah. Pemerintah masih memainkan peran yang sangat penting dalam pasar buruh dan pengembangan sumber daya manusia lokal, sebagai penyedia infrastruktur, seperti pengembangan R&D dan pembangunan EPZs berbasis teknologi tinggi dan maju. Usaha penarikan investasi baik lokal maupun asing, meskipun kemudian investasi asing menjadi lebih penting dibandingkan modal lokal. Peran negara dalam periode ini diinstitutionalisasi melalui HICOM sebagai institusi yang mendorong pengembangan dan perluasan industri, MBC sebagai lembaga konsultasi bersama sektor pemerintah dan swasta, dan PIA sebagai perangkat legal formalnya yang mengatur penarikan investasi.

Tampilnya sektor swasta sebagai aktor penting dalam perekonomian mengubah pola interaksi pemerintah-swasta dan proses pengambilan keputusan yang diambil lebih merupakan hasil-hasil kompromi yang dicapai dalam MBC. Jika intervensi negara sangat intensif sejak tahun 1970-an hingga pertengahan 1980-an akibat adanya tuntutan mendesak agenda redistribusi ekonomi inter-etnis, maka sejak privatisasi dijalankan, banyak peran negara, terutama birokrasi yang dipangkas. Program *the Malaysia Incorporation* dan dibentuknya MBC stabilitas hubungan harmonis pemerintah dan swasta.

Kesimpulan

Pembangunan industri berhasil mentransformasikan ekonomi tradisional Malaysia (ekonomi ekstraktif) menjadi ekonomi industri manufaktur dan jasa berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi dan maju. Industrilisasi yang

berlangsung di Malaysia dikarakterkan sekurang-kurangnya oleh dua hal. Dalam perjalanan panjang intervensi negara dalam industrialisasi selama 1970-2000, peran negara mengalami perubahan sesuai dengan perubahan-perubahan kondisi ekonomi regional dan global. Di Malaysia, peran negara mengalami pergeseran dari *state-led industrialization* menjadi *public-private partnership*. Dalam konsep kemitraan ini, pemerintah memberi kesempatan bagi sektor swasta untuk memimpin ekonomi, khususnya sektor industri. Dari deskripsi kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia, sekurang-kurangnya ada tiga hal yang bisa dipelajari. Pertama, negara memiliki pola *directive intervention* dan sistemik. Kedua, akses terhadap dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi menjadi kunci pencapaian status sebagai negara maju. Ketiga, bahwa keterbukaan terhadap ekonomi internasional dan global merupakan kunci keberhasilan dalam proses industrialisasi.

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal, dan Media Cetak

- Athukorala, Prema-Chandra, *Swimming Against the Tide: Crisis Management in Malaysia*, dalam Arndt H.W., and Hal Hill, (eds.), 1999, *Southeast Asia's Economic Crisis: Origins, Lessons, and the Way Forward*, ISEAS, Singapore.
- Dutt, Ashok K., ed., 1996 *A ten Nation Region*, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht.
- Hansen, Niles, Benjamin Higgins, Donald J. Savoie, 1990, *Regional Policy in a Changing World*, Plenum Press, New York.
- Johnson, Chalmer, 1982, *MITI and the Japanese Miracle*, Stanford University Press, Stanford.
- Jomo, K.S., ed., 1995, *Privatizing Malaysia: Rent, Rhetoric and Realities*, Westview Press, Boulder.
- Kahn, Joel S., 1998, *Southeast Asian Identities: Culture and the Politics of Representation in Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore.
- Krueger, Anne O., 1981, "Export-led Industrial Growth Reconsidered", dalam W.Hong and L.B. Krause (eds), *Trade and Growth of the Advanced Developed Countries in the Pacific Basin*, Korea Development Institute, Seoul.
- Krugman, Paul, 1994, "The Myth of Asia's Miracle", *Foreign Affairs*, N o.73

- Masuyama, Seiichi, Dona Vandenbrink, and Chia Siow Yue, eds., 1997, *Industrial Policies in East Asia*, Nomura Research Institute (NRI) and Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Japan and Singapore.
- Ministry of Finance, 1997, *Economic Report 1995/6*, Percetakan Nasional Malaysia Berhad, Kuala Lumpur.
- Ministry of Finance, 1999, *Economic Report 1997/8*, Percetakan Nasional Malaysia Berhad, Kuala Lumpur.
- Neurath, Richard Luedde, 1988, *State Intervention and Export-oriented Development in South Korea*, Macmillan Press, London.
- Rodan, Garry, Kevin Hewison, and Richard Robison (eds), 1997, *the Political Economy of South – East Asia: An Introduction*, Oxford University Press, New York.
- The New York Times*, 3 September 1998
- White, Gordon, ed., 1988, *Developmental States in East Asia*, MacMillan, London.
- World Bank, 1991, Oxford University Press, New York.
- World Bank, 2000, Oxford University Press, New York.

Internet

- ADB, *Asia Development Outlook 1998*, di <http://www.adb/document/books/ADO/1998/default/asp>, Desember 2007.
- CIA – The World Factbook: Malaysia, 2008, di <http://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/malaysia.htm>, 16 Januari 2008.
- Coutsoukis. Photius, *Malaysia Geography 2000*, CIA World Factbook 2001, 21 Desember 2001 di <http://www.photius.com/wfb200/malaysia/malaysia-geography.htm>, 20 Desember 2002.
- International Finance Center*, “Malaysia, 2002”, di <http://sg.biz.yahoo.com/ifc/sg>, 17 September 2007.
- UNCTAD, *World Investment Report*, 1993 di <http://www.unctad.org/en/press/pr2803.htm>, 20 Desember 2007.

World Investment Report, 1993, di <http://www.unctad.org/en/press/pr.htm>, 20 Desember 2007.